



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



BKPSDM KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, dan atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 telah terealisasi. Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Sumenep, 26 Juni 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Faktor Pendukung.....	6
2.2 Faktor Penghambat	7
2.3 Tindak Lanjut	8
2.4 Evaluasi Rencana Kerja	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
BAB IV PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 2.2	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025	28

BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian target, pagu anggaran dan nomenklatur pada program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi SIPD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2025 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya perubahan Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya perubahan Renja adalah :

- 1) Merealisasikan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3) Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- 4) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Faktor Pendukung
- 2.2 Faktor Penghambat
- 2.3 Tindak Lanjut
- 2.4 Evaluasi Rencana Kerja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II



HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sumenep 2021-2026 terdapat beberapa faktor pendorong antara lain :

1) Program Kepegawaian Daerah

- Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka;
- Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian;
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian;
- Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEG dalam menunjang manajemen kepegawaian;
- Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base, seperti fiber optic Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian;
- Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai.

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi;
- Meningkatnya SDM aparatur yang lulus Diklat.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan kesekretariatan.
- Sumber dana anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.

2.2 Faktor Penghambat

Selain Faktor pendorong, juga terdapat beberapa Faktor Penghambat untuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1) Program Kepegawaian Daerah

- Belum diberlakukannya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara;
- Pelaksanaan Pengadaan ASN tergantung kepada Pemerintah Pusat;
- Belum optimalnya penerapan dan pemberdayaan pemetaan jabatan dan dukungan pengawasan oleh instansi yang berwenang, sehingga di dalam perencanaan, pendistribusian, dan penataan belum dapat terealisasi sesuai dengan hasil pemetaan;
- Masih belum optimalnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;
- Adanya efisiensi anggaran.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan fungsional yang terkait dengan Asesor;
- Terbatasnya jumlah dan kesempatan peningkatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
- Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan kesekretariatan.
- Adanya efisiensi anggaran.

2.3 Tindak Lanjut

Terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya tindak lanjut di masa yang akan datang adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan Koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN terkait Pengadaan ASN serta melaksanakan seleksi rekrutmen dengan objektif, transparan dan terbuka melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
3. Melaksanakan verifikasi dan update data kepegawaian di sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN);
4. Meningkatkan Kompetensi ASN melalui kegiatan assessment, tugas belajar, dan ijin belajar;
5. Mengutamakan kegiatan yang sangat prioritas;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
7. Mempersiapkan inovasi-inovasi dalam layanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik BKPSDM Kabupaten Sumenep.

2.4 Hasil EValuasi Rencana Kerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun 2025**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	86	78,47	91,24	Sangat Tinggi	SI-ASN BKN

2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	0,73	-	-	-	-
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,98	-	-	-	-
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	94	12	12,76	Sangat rendah	Evaluasi Renja TW I

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 ditetapkan 86 dan terealisasi 78,47 dengan capaian indikatornya sebesar 91,24%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran sementara di dalam Sistem Informasi ASN BKN per 31 Maret 2025.
- Indikator Kinerja Indeks Penilaian Sistem Merit tahun 2025 ditetapkan 0,73 dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 ditetapkan 89,98 dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
- Untuk Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 ditetapkan 94 dan terealisasi 12 dengan Capaian Indikatornya sebesar 12,76%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Adapun Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2025 berdasarkan Pohon Kinerja menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
(Berdasarkan Pohon Kinerja)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	88	78,47	89,17	Tinggi	SI-ASN
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Penilaian Sistem Merit	0,75	-	-	-	-
		Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN	84	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN)	35	31,40	89,71	Tinggi	SI-ASN
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	91 (AA)	-	-	-	-
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	12	12,76	-	Evaluasi Renja TW I

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 ditetapkan 88 dan terealisasi 78,47 dengan capaian indikatornya sebesar 89,17%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran sementara di dalam Sistem Informasi ASN BKN per 31 Maret 2025.
- b. Indikator Kinerja Indeks Penilaian Sistem Merit tahun 2025 ditetapkan 0,75 dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara.

- c. Indikator Kinerja Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN tahun 2025 ditetapkan 84 dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara.
- d. Indikator Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) tahun 2025 ditetapkan 35 dan terealisasi 31,47 dengan capaian indikatornya sebesar 89,71%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran sementara di dalam Sistem Informasi ASN BKN per 31 Maret 2025.
- e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 ditetapkan 91 (AA) dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
- f. Untuk Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 ditetapkan 100 dan terealisasi 12 dengan Capaian Indikatornya sebesar 12,76%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 diukur dari realisasi program dan kegiatan tahun 2025, meliputi evaluasi target dan realisasi kinerja kegiatan pada program serta tingkat realisasi capaian program selama pelaksanaan Triwulan I, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor”.

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 10%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 8 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 4 Dokumen.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 5 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 5 Dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 3 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

2. Realisasi Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja program "Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian".

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 90%. realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 15%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan ASN.
- c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- d) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

3. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja program "Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal.

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 47% realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 10%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 2 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 2 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis perangkat daerah dapat tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100%		17				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp			
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		5	03				KEPEGAWAIAN																								
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	39.702.120.882	100	35.723.638.558	100	10.735.325.603	10	2.312.230.140	0	0	0	0	0	0	10	2.312.230.140	10%	22%	110	38.035.868.698	110 %	96%	BKP SDM
		5	03	01	2, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55 Dokumen	20.365.893	33 Dokumen	13.256.290	8 Dokumen	1.204.000	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	50%	0%	37	13.256.290	67 %	65%	
		5	03	01	2, 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	1.130.600	2 Dokumen	804.000	1	0							1	0	50%	0%					
		5	03	01	2, 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26 Laporan	12.125.690	4 Laporan	400.000	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	75%	0%					
		5	03	01	2, 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Laporan	35.876.059.088	20 Laporan	29.287.846.084	5 Laporan	8.889.523.492	0	2.107.475.726	0	0	0	0	0	0	0	2.107.475.726	0%	24 %	20	31.395.321.810	80 %	88%	

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kab. Sumenep Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kab. Sumenep Tahun 2025

		5	03	02	2,01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			8 Dokumen	104.604.280	2 Dokumen	16.120.000	1	1.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.548.000	50%	10%						
		5	03	02	2,01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			6 Dokumen	1.209.555.951	1 Dokumen	305.110.000	0	31.069.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.069.850	0%	10%						
		5	03	02	2,01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			4 Dokumen	177.945.739	1 Dokumen	30.625.000	0	3.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.000	0%	10%						
		5	03	02	2,01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			4 Lembaga	119.386.060	1 Lembaga	34.540.000	0	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.000	0%	9%						
		5	03	02	2,01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			4 Dokumen	229.624.384	1 Dokumen	152.909.000	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	0%	1%						
		5	03	02	2,01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			4 Dokumen	245.932.06	1 Dokumen	73.807.000	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000	0%	2%						
		5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	5 Laporan	2.691.600.807	4 Laporan	1.314.220.854	1 Laporan	577.297.800	0	17.921.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.921.200	0%	3%	4	1.332.142.054	80%	49%		
		5	03	02	2,02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			8 Dokumen	600.811.542	1 Dokumen	241.945.700		14.681.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.681.200	0%	6%						
		5	03	02	2,02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			3776 Dokumen	192.458.060	1000 Dokumen	57.900.500	361	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	361	1.620.000	36%	3%						
		5	03	02	2,02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			4 Dokumen	520.951.252	1 Dokumen	277.451.600		1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	0%	1%						
		5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi	5 Laporan	1.097.270.221	3 Laporan	1.715.934.475	1 Laporan	403.637.200	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000	0%	0%	3	1.717.914.475	60%	157%		

		5	3	02	2, 03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			577 Orang	834.252.841	75 Orang	150.556.000	26	410.000	0	0	0	0	0	0	0	26	410.000	35 %	0%						
		5	3	2	2, 03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			39 Orang	210.059.444	15 Orang	106.746.000	0	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	0%	1%						
		5	03	02	2, 03	0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			4 Dokumen	561.324.933	1 Dokumen	94.166.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%						
		5	3	2	2, 03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			171 Orang	110.297.257	100 Orang	52.169.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%						
		5	03	02	2, 04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	1.699.279.683	4 Laporan	933.675.786	1 Laporan	341.957.000	0	4.860.000	0	-	0	-	0	-	0	0	4.860.000	0%	1%	4	938.535.786	80%	55%		
		6	04	03	3, 04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			4 Dokumen	106.646.996	4 Dokumen	26.009.000	1	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	1	1.470.000	25%	6%						
		5	03	02	2, 04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			4 Laporan	141.450.602	4 Laporan	19.339.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25%	0%						
		5	03	02	2, 04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			2368 Orang	237.585.806	60 Orang	110.406.000	0	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0%	1%						
		5	03	02	2, 04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			1032 Orang	124.457.399	150 Orang	41.078.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%						
		5	03	02	2, 04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			9256 Orang	101.168.826	700 Orang	76.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0%	0%						
		5	03	02	2, 04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			76 Laporan	133.783.493	25 Laporan	45.119.000	1	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	1	2.380.000	4%	5%						
		5	03	02	2, 04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			71 Dokumen	58.027.570	25 Dokumen	9.675.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	32 %	0%						
		5	03	02	2, 04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			4 Laporan	30.555.094	1 Laporan	14.281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%						

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kab. Sumenep Tahun 2025

		5	0	02	2,	00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			7	3.870.972	4	558.84	0	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	0%	0,28						
		5	0	02	2,	00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			5	91.341.57	2	25.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																									16	12								
Predikat kinerja																									Sangat	Sangat								
Rendah																									Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dari pimpinan dan kerjasama dari pegawai untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal kegiatannya tergantung dari Pihak Ketiga misalnya untuk Kegiatan Pengadaan ASN tergantung kebijakan dari Pusat; Kegiatan Diklat PKN II, Administrator dan Pengawas tergantung Jadwal dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :							Melakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :							Melakukan Koordinasi dengan Kemenpan RB terkait Jadwal Pelaksanaan Pengadaan ASN; Berkoordinasi dengan BPSDM dan BKD Provinsi Jawa Timur terkait Pelaksanaan Diklat.																											

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.936.003.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.679.050,00 dengan persentase sebesar 3%. Faktor penghambat pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- a. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan efisiensi dan perubahan anggaran;
- b. Terdapat kegiatan yang jadwal kegiatannya tergantung dari Pihak Ketiga misalnya untuk Kegiatan Pengadaan ASN tergantung kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN RB.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 716.996.900,00 terealisasi sebesar Rp. 4.819.300,00 dengan persentase sebesar 1%. Faktor penghambat pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- a. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan efisiensi dan perubahan anggaran;
- b. Terdapat kegiatan yang jadwal kegiatannya tergantung dari Pihak Ketiga misalnya untuk Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator dan Pengawas tergantung Jadwal dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.735.325.603,00 terealisasi sebesar Rp. 2.312.230.140,00 dengan persentase sebesar 22%.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berisikan kegiatan dan sub kegiatan rutin yang menunjang kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - 1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - 1.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;

- 1.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 1.6 Pengelolaan Data Kepegawaian;
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN;
 - 2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - 2.3 Pengelolaan Promosi ASN.
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 3.2 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;
 - 3.3 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
 - 3.4 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - 4.4 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
 - 4.5 Pembinaan Disiplin ASN;
 - 4.6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
 - 4.7 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
 - 4.8 Evaluasi Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

- 1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
 - 2.3 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Tahun 2025 yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD, dijabarkan dalam Tabel III.1

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							13.389.147.298	13.388.325.503	13.973.291.721	584.144.423							12.957.329.031	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.389.147.298	13.388.325.503	13.973.291.721	584.144.423							12.957.329.031	
	5.03	KEPEGAWAIAN							12.672.142.398	12.671.328.603	13.440.192.221	768.049.823							12.205.986.264	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	10.735.344.248	10.735.325.603	12.009.146.221	-530.610.945							10.204.733.303	
	5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.204.000	1.204.000	1.204.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	BKPSDM	2.426.865	BKPSDM	
	5.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	804.000	804.000	804.000	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	BKPSDM	1.288.980	BKPSDM	
	5.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	400.000	400.000	400.000	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmonis dan adaptif	BKPSDM	1.137.885	BKPSDM	

	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	8.889.523.492	8.889.523.492	10.196.480.917	1.306.957.425			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		8.469.001.305	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73/12 Orang /bulan	73/12 Orang /bulan	8.889.123.492	8.889.123.492	10.196.080.917	1.306.957.425	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		8.467.667.280	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	400.000	400.000	400.000	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		1.334.025	BKPSDM
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.269.045	0	0	-79.269.045			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		107.788.092	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	79.269.045	0	0	-79.269.045	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		76.288.092	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0	0	0	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			31.500.000	BKPSDM

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	484.033.475	520.141.475	343.187.693	-140.845.782			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		288.137.850	BKPSDM
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.238.000	33.238.000	21.938.500	-11.299.500	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		34.995.345	BKPSDM
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	205.634.275	205.634.275	144.814.693	-60.819.582	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		75.272.085	BKPSDM
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.921.000	127.921.000	52.502.300	-75.418.700	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		55.891.605	KPSDM
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.700.000	20.700.000	12.420.000	-8.280.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		21.682.500	KPSDM
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	14.780.200	14.780.200	14.780.200	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		15.166.515	BKPSDM
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	81.760.000	117.868.000	96.732.000	14.972.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		85.129.800	BKPSDM
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	73.028.010	73.028.010	131.171.031	58.143.021	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		148.475.004	BKPSDM
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	18 Unit	73.028.010	73.028.010	131.171.031	58.143.021	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		148.475.004	BKPSDM
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	854.840.456	854.840.456	853.056.456	-1.784.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	- BKPSDM		903.977.189	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.475.400	5.475.400	3.691.400	-1.784.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		12.143.880	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	434.732.200	434.732.200	434.732.200	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		456.468.810	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	414.632.856	414.632.856	414.632.856	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		435.364.499	BKPSDM
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	353.445.770	396.588.170	484.046.124	130.600.354	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		284.926.998	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	16 Unit	90.499.470	133.641.870	203.890.650	113.391.180	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		48.970.950	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	262.946.300	262.946.300	280.155.474	17.209.174	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM		235.956.048	BKPSDM
2,	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian				90	90	1.936.798.150	1.936.003.000	1.431.046.000	64.454.811							2.001.252.961	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1 Laporan	1 Laporan	613.417.750	613.111.000	396.163.000	-217.254.750	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		545.781.181	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	16.120.000	16.120.000	8.060.000	-8.060.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		18.443.355	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		

			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	305.153.750	305.110.000	277.190.000	-27.963.750	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		321.446.160	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.780.000	30.625.000	15.310.000	-15.470.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		33.210.555	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	34.540.000	34.540.000	21.240.000	-13.300.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		36.832.950	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	152.939.000	152.909.000	52.909.000	-100.030.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		57.615.758	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	73.885.000	73.807.000	21.454.000	-52.431.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		78.232.403	BKPSDM
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN				1 Laporan	1 Laporan	577.386.000	577.297.800	514.113.000	-63.273.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		524.713.560	BKPSDM

5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	241.945.700	241.945.700	210.379.000	-31.566.700	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		285.989.865	BKPSDM
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	1000 Dokumen	57.988.700	57.900.500	29.247.000	-28.741.700	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		75.051.480	BKPSDM
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	277.451.600	277.451.600	274.487.000	-2.964.600	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		163.672.215	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN				1 Laporan	1 Laporan	403.637.400	403.637.200	298.071.000	-105.566.400	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		545.139.630	BKPSDM
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		100.000.000	BKPSDM
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				75 Orang	75 Orang	150.556.000	150.556.000	141.371.000	-9.185.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		25.441.290	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15 Orang	6 Orang	106.746.000	106.746.000	64.026.000	-42.720.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		114.530.010	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	94.166.000	94.166.000	53.670.800	-40.495.200	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		103.499.025	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	52.169.400	52.169.200	39.003.200	-13.166.200	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		58.184.595	BKPSDM
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	342.357.000	341.957.000	222.699.000	-119.658.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		385.618.590	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	4 Dokumen	26.009.000	26.009.000	13.040.000	-12.969.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformas politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		31.297.350	BKPSDM

	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				1 Laporan	4 Laporan	19.339.000	19.339.000	9.915.000	-9.424.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		29.508.780	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				60 Orang	60 Orang	110.406.000	110.406.000	66.548.000	-43.858.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		125.996.745,00	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				150 Orang	150 Orang	41.478.000,00	41.078.000,00	12.994.000,00	-28.484.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		48.665.715,00	BKPSDM

	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				700 Orang	700 Orang	76.050.000,00	76.050.000,00	71.640.000,00	-4.410.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		84.664.335,00	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				25 Laporan	25 Laporan	45.119.000	45.119.000	38.632.000	-6.487.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		28.832.475	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		

			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				25 Dokumen	25 Dokumen	9.675.000	9.675.000	2.660.000	-7.015.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			18.989.145	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	14.281.000,00	14.281.000,00	7.270.000,00	-7.011.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			17.664.045,00	BKPSDM
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal				0	0	717.004.900	716.996.900	533.099.500	-183.905.400							751.342.767	BKPSDM
									717.004.900	716.996.900	533.099.500	34.337.867							751.342.767	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN				2 Laporan	2 Laporan	132.688.700	132.680.700	72.558.300	-60.130.400	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		137.608.590	BKPSDM
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		BKPSDM
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	37.955.100	37.947.100	20.611.100	-17.344.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		34.107.150	BKPSDM
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				20 Orang	10 Orang	94.733.600	94.733.600	51.947.200	-42.786.400	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		103.501.440	BKPSDM

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	584.316.200	584.316.200	460.541.200	-123.775.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		498.234.177	BKPSDM
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		BKPSDM
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	558.846.500	558.846.500	447.898.500	-110.948.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		472.789.380	BKPSDM
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		BKPSDM
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				2 Dokumen	2 Dokumen	25.469.700	25.469.700	12.642.700	-12.827.000	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		25.444.797	BKPSDM
5.04.02.2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-				-	-	0	0	0	0			-	-	-		115.500.000	BKPSDM
5.04.02.2.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		BKPSDM
		Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				8 Orang	8 Orang	0	0	0	0	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara		115.500.000	BKPSDM
J U M L A H								13.389.147.298	13.388.325.503	13.973.291.721	513.453.681.328							12.957.329.031	

BAB IV



PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta hasil evaluasi dari Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2025 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Sumenep, 26 Juni 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**

Dr. Ir. ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si., IPU
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010